



**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DALAM RANGKA PENGUATAN NILAI KARAKTER KEJUJURAN
PADA PESERTA DIDIK**

Niken Tri Prasetyowati¹, Sutoyo², Siti Supeni³ Universitas Slamet Riyadi
nitirip21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Mojolaban (2) Mengetahui apakah implementasi pendidikan antikorupsi benar menjadi penguat nilai karakter kejujuran pada peserta didik kelas VIII. (3) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada peserta didik kelas VIII. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mojolaban. Dalam subjek penelitian ini antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PPKn, dan peserta didik. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) SMP Negeri 1 Mojolaban sudah memberikan pembelajaran pendidikan antikorupsi karena pendidikan antikorupsi ini sangat penting di pelajari dengan pendidikan antikorupsi di dalam kurikulum dapat mengajarkan kepada peserta didik untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dan mengajarkan hal-hal tentang bahaya melakukan korupsi, sehingga peserta didik di masa yang akan datang negara kita bisa bebas dari perilaku korupsi. 2) Pendidikan antikorupsi benar menjadi penguat nilai karakter kejujuran. 3) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu: a. faktor pendukung: komitmen guru, sarana- prasarana sekolah yang memadai, dukungan orang tua, lingkungan yang kondusif, adanya kerjasama semua komponen, guru saling bekerja sama, peran guru BK dalam menangani peserta didik; b. faktor penghambat: Wabah covid-19, kurangnya motivasi, perbedaan pendapat, guru merasa kewalahan, kemampuan kemampuan guru memilih mata pelajaran, pendidikan anti korupsi belum sepenuhnya di implementasikan, masih ada beberapa guru yang belum mengintegrasikan, dan rendahnya minat belajar peserta didik.

Kata Kunci: *Nilai Kejujuran, Pendidikan antikorupsi, Nilai Karakter.*

ABSTRACT

The objectives of this study were to: (1) find out how the implementation of anti-corruption education in order to strengthen the value of honesty character in class VIII students at SMP Negeri 1 Mojolaban (2) find out whether the implementation of anti-corruption education is correct to strengthen the value of honesty character in class VIII students. (3) Knowing the factors that support and hinder the implementation of anti-corruption education in order to strengthen the value of the character of honesty in class VIII students. This research was conducted at SMP Negeri 1 Mojolaban. The subjects of this research include principals, vice principals, PPKn teachers, and students. The data source uses primary data sources and secondary data sources. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The validity of the data was tested by technique triangulation and source triangulation. The research data were analyzed using a qualitative descriptive analysis technique with an interactive model.

The results of the study can be concluded that: 1) SMP Negeri 1 Mojolaban has provided anti-corruption education lessons because anti-corruption education is very important to learn with anti-corruption education in the curriculum can teach students to be honest, responsible and teach things about the dangers of committing crimes. corruption, so that students in the future of our country can be free from corrupt behavior. 2) True anti-corruption education is a reinforcement of the character value of honesty. 3) there are 2 influencing factors, namely: a. supporting factors: teacher commitment, adequate school infrastructure, parental support, conducive environment, cooperation of all components, teachers working together, the role of BK teachers in dealing with students; b. Inhibiting factors: The Covid-19 outbreak, lack of motivation, differences of opinion, teachers feel overwhelmed, the ability of teachers to choose subjects, anti-corruption education has not been fully implemented, there are still some teachers who have not integrated, and students' low interest in learning.

Keywords: Honesty Value, Anti-corruption Education, Character Value.

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia seolah-oleh menjadi fenomena eksesif yang berlangsung hampir di semua institusi pemerintah. Dari kepala negara sampai kepala desa tak sepi dari isu korupsi. Korupsi juga ternyata terjadi di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Kementerian Agama, dan bahkan di Kementerian Pendidikan. Bisa dikatakan bahwa virus korupsi sudah menyebar ke segala aspek kehidupan manusia. Kasus korupsi di Indonesia terjadi di semua institusi dan diberbagai tingkat kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti memberikan uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti banyak kasus yang terjadi. Di Indonesia, bahkan ex-Menteri Sosial, Juliari Batubara,

ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Seperti dilansir oleh KPK, Juliari didakwa telah merugikan negara sebesar 14 Miliar Rupiah karena korupsi tersebut. Kini publik di Indonesia menantikan babak selanjutnya di pengadilan untuk melihat putusan pengadilan terhadap dakwaan tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

Permasalahan korupsi diatas merupakan suatu dari penghianatan terhadap bangsa, karena bangsa Indonesia terdiri atas hukum yang berlaku dan telah disepakati. Untuk mengatasi permasalahan ini jelas dibutuhkan upaya yang baik sehingga mampu menekan angka penyalahgunaan korupsi, baik itu kepolisian, kejaksaan dan komisi

pemberantasan korupsi (KPK). Disamping beberapa lembaga berwenang tersebut, pencegahan tindak pidana korupsi juga memerlukan solusi dengan sudut pandang lain, yaitu dengan sudut pandang pendidikan.

Pada dasarnya sektor pendidikan formal di Indonesia memang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian pendidikan sangatlah berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada yakni tindak korupsi. Secara rasionalis sektor pendidikan formal di Indonesia memang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah pencegahan tersebut secara tidak langsung melalui dua pendekatan, pertama, menjadikan peserta didik menjadi target, serta kedua menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tak mewabah pada korupsi.

Nilai Antikorupsi tidak berbentuk mata pelajaran, melainkan nilai-nilai Antikorupsi tersebut diintegrasikan kedalam mata pelajaran. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan antikorupsi adalah kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan tidak korupsi. Pendidikan ini mengarah pada malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah apabila menyaksikan. Nilai-nilai Antikorupsi di rancang pada mata pelajaran PPKn dan PAI yang terintegrasi dengan proses pembelajaran sebagai kurikulum tersembunyi. Akan tetapi nyatanya

masih kurangnya penanaman langsung dan sistematis guru terhadap peserta didik merupakan masalah yang memprihatinkan karena dampak dari Covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar berjalan tidak efektif. Sehingga berakibat pada peserta didik, yang dapat menjadikan peserta didik menjadi apatis terhadap kasus korupsi. Dan menganggap korupsi adalah hal yang sudah biasa dilakukan.

Guru di tuntut untuk tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai Antikorupsi saja namun diharapkan bisa menjadi suri tauladan langsung oleh peserta didik. Lingkungan sekolah bukan hanya sebagai tempat proses belajar mengajar mengenai ilmu ilmu pengetahuan tetapi sekolah mempunyai fungsi yang lebih yaitu tempat membentuk kepribadian anak. Melalui terobosan-terobosan rancangan kurikulum sekolah mempunyai kegiatan atau pembiasaan di lingkungan sekolah yang mendukung bagi terbentuknya karakter peserta didik dan memberikan efek pada sikap akhlak mulia.

Dengan tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan penguatan kepada guru untuk mulai mengembangkan karakter kejujuran dan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di dalam pengembangan kurikulum sekolah. Penelitian ini di lakukan di SMP Negeri 1 Mojolaban, karena merupakan salah satu sekolah yang ikut andil dalam melaksanakan program pemerintah untuk menanamkan nilai karakter kejujuran dan juga pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan nilai karakter kejujuran dan pendidikan antikorupsi dilaksanakan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. Hal ini juga terjadi pada semua mata pelajaran dalam penanaman pendidikan karakter kejujuran dan juga mata pelajaran pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn yang dilaksanakan di kelas VII, VIII, dan IX. Dalam penguatan nilai karakter kejujuran dan implementasi

Pendidikan antikorupsi salah satunya bertujuan untuk membentuk perilaku jujur, antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai kejujuran dan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk di tanamkan kepada peserta didik saat proses pembelajaran.

B. KAJIAN TEORI

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa eropa, seperti inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; perancis yaitu *corruption*; belanda yaitu *corruptie*, *koruptie*. Dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi menurut Anas Salahudin (2018:32) Secara harfiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pendidikan antikorupsi adalah hal mendasar, mengingat tujuan dari pendidikan tidak hanya mengembangkan dimensi kognitif namun juga dimensi afektif. Menurut Agus Wibowo(2013:38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.

Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Permendiknas No 22 dan 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sekarang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Pendidikan antikorupsi wajib diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan serta sikap yang

keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi yang diberikan disekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindak-tindak korup generasi sebelumnya, namun hanya saja memberikan Pendidikan antikorupsi bukan hal yang mudah.

Bahkan fenomena lahirnya praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan contoh yang baik berperilaku amanah dalam berkata dan melakukan termasuk disekolah negeri ini. Contoh guru menjelaskan hal-hal yang idealis dalam menambahkan penyimpanan, penyimpanan pangkal kaya namun realitanya banyak guru yang korupsi seperti korupsi waktu, korupsi materi pelajaran yang diberikan, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal seperti itu juga bisa memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan. Nilai-nilai antikorupsi pada konteks Pendidikan antikorupsi, yang dirumuskan dalam pendidikan nasional, dibatasi pada sembilan nilai, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. (Salahudin, 2018:208).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Mojolaban Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif model interaktif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana keadaan dan fenomena yang terjadi sebenarnya, kemudian dideskripsikan kedalam laporan penelitian. Metode kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif yang ada di lapangan tanpa adanya manipulasi data yang ada. (Zainal Arifin,

2011:140). Peneliti menggambarkan objek dan subjek penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis miles dan huberman yang terdiri Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan berbagai upaya dalam rangka proses penelitian ini, sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara kepada responden, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada pembelajaran. Sesuai dengan batasan masalah yang peneliti ambil yakni implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran dan juga hambatan apa saja yang menyulitkan ketercapaian pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi ini dibatasi yakni nilai kejujuran. Hal yang peneliti lakukan pada tahap observasi adalah mengamati apa saja yang menjadi permasalahan yang muncul dalam implementasi pendidikan korupsi dan karakter kejujuran. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mojolaban. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bag kesiswaan, guru PPKn, dan peserta didik.

Wawancara disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Ada 2 fokus penelitian ini. Pada teknik wawancara ini peneliti mendapatkan secara langsung melalui kepala sekolah, waka kesiswaan, guru PPKn, dan peserta didik SMP Negeri 1 Mojolaban. Data yang peneliti dapatkan dari staf dan tata usaha jumlah siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban kelas VIII tahun ajaran 2022 berjumlah 255 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Peserta Didik Kelas VIII

Kelas	L	P	Jumlah
VIII A	9	22	31
VIII B	10	21	31
VIII C	10	22	32
VIII D	11	21	32
VIII E	10	22	32
VIII F	10	22	32
VIII G	10	22	32
VIII H	11	22	33
Jumlah Kelas VIII	81	174	255

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan peserta didik di SMP Negeri 1 Mojolaban sebagai berikut :

Peneliti menggunakan sampel peserta didik sejumlah 8 peserta didik dan sesuai dengan pemerataan kelas karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti, dan sudah memenuhi kriteria untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran. dengan persentase peserta didik laki-laki 12,5 % dan perempuan 87,5 %. Dari observasi yang telah dilaksanakan, peneliti mengkerucutkan sample dengan mengambil perwakilan 1 orang peserta didik di masing-masing kelas yang sudah dianggap memenuhi kriteria. Kriteria yang diinginkan oleh peneliti adalah peserta didik yang aktif dikelas maupun organisasi dan berani berpendapat.

Dokumentasi, peneliti menghimpun data-data kondisi fisik sekolah, letak sekolah, sarana prasarana, keadaan guru, keadaan peserta didik, RPP Guru, keadaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan setelah di dapat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan di

lapangan di objek penelitian di SMP Negeri 1 Mojolaban tentang implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Mojolaban dapat diperoleh :

1. Implementasi Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Mojolaban

Berdasarkan kurikulum yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat di lakukan di seluruh tingkatan kelas sekolah menengah pertama. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel pada kelas VIII. Dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi, guru mata pelajaran PPKn pada masing-masing kelas sudah memahami apa yang di maksud dengan nilai pendidikan antikorupsi. Sebagaimana dikatakan oleh narasumber 3 selaku guru mata pelajaran PPKn: Pendidikan antikorupsi sama dengan pendidikan karakter. Peserta didik diajarkan untuk mempunyai sikap yang jujur, bertanggung jawab, kerja keras, mempunyai rasa kepedulian, berani dan yang lainnya. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan perlu di implementasikan karena penanaman pemahaman tentang bahaya korupsi itu sangat merugikan di segala aspek kehidupan maka dari itu perlu diimplementasikan. (Hasil wawancara 19 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara yang diutarakan oleh narasumber 3 diatas yaitu mengenai pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari dan seharusnya dapat diimplementasikan di semua mata pelajaran karena korupsi dapat

merugikan Negara dan masyarakat banyak seperti yang di ungkapkan oleh narasumber 3 bahwa pendidikan antikorupsi itu perlu di integrasikan dalam mata pelajaran PPKn bahwa pengimplementasian pendidikan antikorupsi itu sangatlah penting. Dengan hal tersebut dapat menanamkan pemahaman kepada peserta didik tentang bahayanya korupsi karena dapat merugikan disetiap aspek kehidupan. Hal ini didukung dengan jawaban dari narasumber 10 selaku peserta didik SMP N 1 Mojolaban sebagai berikut

Peserta didik sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan, diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia nantinya. Peran aktif peserta didik diharapkan lebih di fokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Peserta didik diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor Penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting untuk dapat berperan aktif peserta didik harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. (hasil wawancara 19 Mei 2022)

Dari Observasi yang dilakukan peneliti pada bulan februari menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan maksimal, di karenakan dalam rencana pembelajaran peserta didik dicantumkan pengembangan pendidikan antikorupsi. Hal ini terjadi juga pada saat proses pembelajaran pendidikan

antikorupsi disisipkan kedalam materi yang diajarkan. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan di kelas VIII saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada hari senin 14 Maret 2022 pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban menunjukkan bahwa guru menjelaskan tentang korupsi dan pemberantasannya. Dalam penjelasannya guru mengintegrasikan nilai antikorupsi kedalam proses pembelajaran. Diharapkan siswa mampu menghayati nilai pendidikan antikorupsi dengan menerapkan di kehidupan sehari-hari, siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan akhirnya akan bersikap anti-koruptif. Hal ini didukung dengan hasil

Wawancara dengan narasumber 4 selaku guru mata pelajaran PPKn: Biasanya apabila ada pokok bahasan yang sedang di pelajari yang mempunyai kaitan dengan pendidikan antikorupsi selalu dikaitkan dengan bentuk-bentuk korupsi, dampak, jenis dan lain-lain atau di sisipkan melalui pesan-pesan moral yang memiliki nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses belajar mengajar. (hasil wawancara 17 Mei 2022)

Selain itu pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Mojolaban juga didukung dengan adanya koperasi kejujuran. Di perkuat dengan pernyataan narasumber 1: Pelaksanaan pendidikan antikorupsi juga didukung dengan adanya pelaksanaan koperasi kejujuran, tata tertib sekolah dan budaya sekolah. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi peserta didik dapat memiliki karakter yang baik di lingkungan sekolah dan terbiasa untuk mematuhi tata tertib. Implementasinya yaitu pihak

yang berwenang harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendidikan antikorupsi dan pihak yang berwenang harus mempunyai keinginan serta komitmen yang kuat untuk belajar materi pendidikan antikorupsi. Dan adanya komitmen yang kuat dari seluruh warga dan juga pemerintah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan antikorupsi. (hasil wawancara 17 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pendidikan anti korupsi itu hanya terintegrasi dalam pembelajaran PPKn saja untuk menanamkan karakter kejujuran. Pendidikan antikorupsi itu hanya di uraikan di mata pelajaran PPKn saja dan belum di pelajari di mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu guru yang akan mengajarkan pendidikan antikorupsi seharusnya mengikuti sebuah pelatihan atau "*training of trainer*" dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat terselenggaranya pendidikan antikorupsi dengan baik, dengan adanya pendidikan antikorupsi ini diharapkan menekan laju korupsi di Indonesia. Seperti yang disampaikan narasumber 1 bahwa guru atau pihak yang berwenang yang mengajar pendidikan antikorupsi harus melakukan *training of trainer* dan melakukan pembinaan dari kementerian pendidikan dan KPK sebelum mengajarkan pendidikan antikorupsi pada peserta didik sebagai komitmen yang kuat untuk belajar materi pendidikan antikorupsi. Setelah itu guru atau pihak yang mengajarkan pendidikan antikorupsi dapat mengembangkan dan menyusun rencana pembelajaran serta membangun kesadaran antikorupsi pada peserta didik. Narasumber 2 selaku waka kesiswaan di SMP Negeri 1 Mojolaban

juga menambahkan kepada peneliti bahwa. Proses pelaksanaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi diluar proses pembelajarannya kemungkinan akan banyak bekerja sama dengan guru piket KBM yang ditempatkan beberapa guru yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengecek kerapian peserta didik serta ketertiban peserta didik hal tersebut juga di bantu dengan osis. (hasil wawancara 18 Mei 2022)

Hal tersebut di perkuat juga oleh pendapat yang disampaikan narasumber 9 selaku peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban, menyatakan : Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang mengajarkan kepada peserta didik tentang korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara. Sekaligus sebagai seorang pelajar diharapkan dapat menyampaikan kepada lingkungan sekitar terkhusus di lingkungan sekolah yang nantinya mengajarkannya kepada generasi di kemudian hari. Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan dapat membangun kesadaran peserta didik akan buruknya melakukan korupsi, karena peserta didik adalah generasi penerus bangsa di kemudian hari. Contohnya mengakui pada saat tidak mengerjakan PR dan memberi alasan atau penjelasan dengan jujur, Tidak mencuri barang milik orang lain, Tidak menggunakan uang kebutuhan sekolah untuk hal yang lain (hasil wawancara 21 Mei 2022) Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber 12, 5, 8, 11 dan 6 selaku peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban. Namun sedikit berbeda diungkapkan oleh narasumber 7 selaku peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban, menyatakan: Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang

dapat membuka luas tentang pemahaman kita mengenai antikorupsi. Di mana ini juga merupakan salah satu solusi terbaik dengan pendidikan yang tidak lain hanya untuk membangun persatuan untuk bersama-sama mencegah antikorupsi dalam sekolah. Namun hal ini sangat disayangkan akibat banyaknya permasalahan yang sering kali terjadi di dunia pendidikan antikorupsi. Hal ini tidak lepas di karenakan kurangnya informasi yang di dapatkan mengenai hal-hal tentang pendidikan antikorupsi itu sendiri. (hasil wawancara 20 Mei 2022)

Berdasarkan paparan data diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh lembaga SMP Negeri 1 Mojolaban sudah di lakukan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah, waka kesiswaan, guru PPKn serta peserta didik mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMP Negeri 1 Mojolaban untuk menumbuhkan sikap atau karakter dari nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam diri peserta didik. Selain itu pihak sekolah juga sudah memantau dengan baik ketertiban sekolah yaitu melalui guru piket KBM. Pelaksanaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi didalam lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sikap yang baik dalam peserta didik akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan peserta didik di atas, peneliti menemukan bahwa SMP Negeri 1 Mojolaban sudah memberikan pembelajaran pendidikan antikorupsi karena pendidikan antikorupsi ini sangat penting di pelajari dengan pendidikan

antikorupsi di dalam kurikulum dapat mengajarkan kepada peserta didik untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dan mengajarkan hal-hal tentang bahaya melakukan korupsi, sehingga peserta didik di masa yang akan datang negara kita bisa bebas dari perilaku korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi ini diharapkan dapat mencegah melakukan korupsi pada peserta didik. Namun pendidikan antikorupsi ini masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya pelatihan training untuk guru atau pihak tertentu yang akan mengajarkan pendidikan antikorupsi sehingga pendidikan antikorupsi ini dapat diimplementasikan di semua mata pelajaran tidak hanya pada PPKn saja.

Dari hasil wawancara dengan peserta didik, peneliti menemukan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah sudah dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan hasil wawancara sekaligus observasi menurut data wawancara pada narasumber 9 yang menyatakan sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi contohnya mengakui pada saat tidak mengerjakan tugas dan memberi alasan atau penjelasan dengan jujur, tidak mencuri barang orang lain, tidak menggunakan kebutuhan sekolah untuk hal lain. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh narasumber 10 sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dengan membeli dikantin kejujuran secara jujur meskipun kantin tidak ada yang menjaga dan dalam keadaan ramai. Begitupun dengan narasumber 12 sudah menerapkan pendidikan antikorupsi dengan tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Contoh dari implementasi pendidikan antikorupsi pada peserta

didik yang lain juga melaksanakan piket dengan baik, apabila diberi amanat disampaikan tanpa ditambah atau dikurangi, apabila meminjam sesuatu harus dikembalikan, dan membayar kas dengan jujur, tidak memanipulasi data, bersikap arif dan bijaksana, melaksanakan tata tertib sekolah, menyiram air setekah menggunakan toilet, dan pelaksanaan kegiatan ibadah bersama. Dalam lampiran skripsi ini terdapat RPS (rencana pembelajaran siswa) yang digunakan dalam pembelajaran kewarganegaraan yang diberikan oleh guru PPKn. Dimana didalam RPS tersebut terlihat terlihat lembar penilaian sikap siswa yang salah satunya mencakup nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Selain RPS juga terdapat lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Implementasi Pendidikan antikorupsi Sebagai penguat nilai karakter kejujuran

Dalam penanaman nilai karakter kejujuran, pendidikan antikorupsi berperan penting sebagai penguat dalam menaamkan nilai karakter tersebut. Karena materi tentang antikorupsi sangat berkaitan erat dengan kejujuran. kejujuran juga seringkali dijadikan sebagai pedoman di lingkungan sekolah, begitu pula di lingkungan SMP N 1 Mojolaban nilai karakter kejujuran sangat dijunjung tinggi dan disisipkan di setiap mata pelajaran. Namun dalam penelitian yang peneliti lakukan peneliti mendapatkan bahwa di SMP N 1 Mojolaban masih belum maksimal dalam pemberian materi pendidikan antikorupsi dan penerapan nilai karakter kejujuran, narasumber 1 mengatakan bahwa sebagai salah satu upaya dalam pemberian materi pendidikan antikorupsi dan penerapan nilai karakter

kejujuran, SMP N 1 Mojolaban pernah membuka kantin kejujuran. akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik terlebih pada saat Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Mojolaban tidak terlepas dari adanya penggunaan strategi dalam pelaksanaannya. Salah satu strategi itu adalah semua guru harus menjadi contoh teladan bagi para siswa, Namun sekolah memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber 3 selaku guru PPKn beliau mengungkapkan: Strategi sangat penting agar pelaksanaan penguatan nilai karakter kejujuran ini berjalan dengan baik. Sebagai guru berusaha sebaik mungkin agar menjadi teladan bagi peserta didik, untuk menjadi teladan ini juga dalam binaan guru yang lebih senior, dalam menegakkan pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran dengan cara setiap hari bagi guru yang piket diharuskan datang lebih awal untuk menyambut peserta didik di depan, selain itu juga ada guru yang piket untuk mengontrol kebersihan kelas (hasil wawancara 19 Mei 2022)

Hal yang berbeda diungkapkan oleh narasumber 4 selaku guru PPKn beliau mengungkapkan : Strategi banyak dan bermacam macam. Selama ini sebagai guru di himbau untuk selalu menjadi penutan baik dan dapat menjadi pengayom peserta didik. Dalam menguatkan nilai karakter jujur ini sebagai guru untuk menambah motivasi bagi siswa dengan memberikan reward. Mengumumkan peserta didik yang

berlaku jujur dihadapan teman-teman yang lain lalu memberikan reward ini dimaksudkan agar peserta didik yang lain mau berlomba-lomba menerapkan karakter jujur dalam dirinya dan mencegah tindakan korupsi. Walaupun diawalnya hanya karena reward namun jika sudah terbiasa akan menjadi kebiasaan yang baik dan menumbuhkan rasa kesadaran akan ada kesadaran dalam diri peserta didik untuk memiliki karakter jujur dalam kehidupannya. (hasil wawancara 17 Mei 2022)

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Mojolaban berikutnya adalah memasukkan 18 nilai-nilai karakter ke semua mata pelajaran, termasuk didalamnya adalah karakter jujur sebagaimana di ungkapkan narasumber 2 selaku Waka. Kesiswaan ,Sebagai waka kesiswaan menghimbau para bapak ibu guru yang mengajar untuk sebisa mungkin memasukan nilai nilai karakter dalam setiap KBM yang di ampunya. Jadi harapannya bapak ibu guru tidak hanya menyampaikan pelajaran saja. Tapi juga, nilai-nilai karakter yang ada kaitanya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh jujur yang di aplikasikan untuk tidak mencontek saat ulangan dan lain-lain. Ini bertujuan agar peserta didik selalu mendapat suntikan positif setiap harinya dan selalu mendapat perhatian dari bapak ibu guru. pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Mojolaban ini tidak hanya di dalam kelas saja. Tetapi, dari awal masuk sudah di ajarkan untuk berkarakter baik. Pertama anak masuk sekolah bagi yang membawa sepeda harus turun dan di sambut dengan guru di depan gerbang untuk salaman. Kedua bagi peserta didik yang terlambat, tidak memakai seragam, tidak memakai atribut lengkap

langsung diberi tindakan yang mendidik. Ketiga sampai di kelas bagi yang piket membersihkan kelas yang pantau oleh guru yang piket termasuk membersihkan meja guru dan merapikan, setelah itu bel berbunyi peserta didik berdoa terlebih dahulu. Setelah istirahat peserta didik juga disarankan untuk sholat dhuha di mushola sekolah. Dan pada waktu istirahat kedua siswa wajib untuk melaksanakan sholat dzuhur berjamaah.

Nilai karakter kejujuran bukan hanya diberikan secara lisan namun juga menggunakan motivasi dan pembiasaan, dalam pembentukan karakter peserta didik memerlukan pembiasaan dalam melaksanakan karakter terutama karakter jujur baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal tersebut dikarenakan karakter dalam pembentukannya perlu dilakukan secara berulang agar menjadi jati diri peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan motivasi dan pembiasaan agar peserta didik dapat menumbuhkan karakter kejujuran dengan maksimal. Nilai karakter kejujuran juga dipengaruhi dari lingkungan dirumah, dapat dikatakan pendampingan orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan karakter peserta didik termasuk nilai karakter kejujuran. Dalam pembentukan nilai karakter kejujuran sebagai orang tua dirumah diharuskan memberikan contoh terkait karakter jujur, akan tetapi orang tua sekarang malah lebih sering menganggap jika anak sudah kesekolah mereka tidak perlu memberikan contoh. Anggapan seperti ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pembentukan karakter peserta didik di rumah. Peneliti juga mencoba mewawancarai peserta didik terkait

dengan pendidikan antikorupsi dan nilai karakter kejujuran. Pengertian nilai karakter kejujuran menurut peserta didik yang pertama

Narasumber 5 selaku peserta didik SMP N 1 Mojolaban mengungkapkan: Nilai karakter kejujuran adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah tidak dikurangi dan tidak menyembunyikan kejujuran contohnya tidak mencontek ketika ulangan. (Hasil wawancara 19 Mei 2022) Menurut narasumber 9 selaku peserta didik SMP N 1 Mojolaban mengatakan bahwa: Nilai karakter kejujuran adalah sikap ataupun perilaku seseorang yang senantiasa dapat menyesuaikan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya sehingga seseorang tersebut dapat dipercayai. (hasil wawancara 21 Mei 2022) Hal yang sama juga di ungkapkan oleh peserta didik yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kejujuran adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesungguhnya, tidak berbohong dan tidak dibuat-buat. Kejujuran merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam pancasila yang termasuk dalam nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercantum di dalam Pancasila. Kejujuran juga termasuk ke dalam nilai moral. Perilaku jujur merupakan dasar dari segala perilaku terpuji lainnya. Karakter jujur sangat penting dan harus dimiliki semua generasi muda Indonesia agar kedepan dapat tercipta generasi-generasi dengan kualitas terbaik yang memiliki sikap jujur agar kelak pemerintahan pun dipegang oleh orang-orang yang memiliki karakter jujur. peserta didik telah menerapkan pendidikan karakter

jujur. Hal yang sama juga diungkapkan oleh peserta didik yang lain.

Pendidikan antikorupsi benar sebagai penguat nilai karakter kejujuran pada peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber 5 selaku peserta didik bahwa pendidikan antikorupsi benar menjadi penguat nilai karakter kejujuran, karena pendidikan antikorupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah suatu korupsi.

3. Hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran.

Berikut keterangan dari narasumber 4 selaku guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban. Hambatan yang di hadapi dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn adalah rendahnya minat peserta didik untuk mempelajari tentang korupsi yang tentunya akan berimbas pada rendahnya juga pemahaman terhadap korupsi itu juga sehingga ketidak pedulian akan masalah-masalah korupsi akan melahirkan generasi yang apatis terhadap kondisi negara. (hasil wawancara 17 Mei 2022)

Menurut beliau sebetulnya yang menjadi hambatan implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila di sekolah adalah karena saat ini peserta didik kurang minat untuk mempelajari tentang korupsi sehingga akan berimbas juga pada rendahnya pemahaman peserta didik tentang korupsi itu sendiri dan membuat peserta didik kurang peduli tentang masalah-masalah korupsi sehingga melahirkan generasi apatis yang tidak peduli dengan negara.

Demikian pula hasil wawancara dengan narasumber 3 selaku salah satu guru PPKn. Hambatannya berupa pemahaman tentang konsep pendidikan antikorupsi yang masih belum menyeluruh, belum dapat memilih nilai-nilai antikorupsi yang sesuai dengan pembelajaran yang diampunya, belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran yang diampunya dan seharusnya pendidikan antikorupsi di masukkan ke dalam kurikulum di semua mata pelajaran agar peserta didik sebagai anggota masyarakat dapat membantu untuk menyikapi dan menghindari perilaku korupsi dengan cara tertentu ketika berada di masyarakat dan keluarganya. Apapun alasannya korupsi adalah perbuatan tercela. (hasil wawancara 19 Mei 2022)

Dari hasil wawancara narasumber diatas peneliti menemukan bahwa pembelajaran pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Mojolaban pada proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan belum mampu di aplikasikan secara utuh khususnya dalam proses pembelajaran, hal ini di karenakan adanya guru yang belum memahami secara menyeluruh tentang konsep pendidikan antikorupsi itu sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pendidikan antikorupsi saat ini belum di imlementasikan dengan baik sebagaimana yang disampaikan narasumber bahwa pemahaman tentang konsep pendidikan antikorupsi yang masih belum menyeluruh, belum dapat memilih nilai-nilai antikorupsi yang sesuai dengan pembelajaran yang diampunya dan belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran yang diampunya.

Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh narasumber 9 selaku peserta didik SMP Negeri 1 Mojolaban menyatakan: Hambatannya guru kurang aktif dalam

menyampaikan akan bahaya jika penerus bangsa terlibat dalam kejahatan korupsi, sehingga peserta didik masih banyak yang belum paham tentang korupsi. (hasil wawancara 21 Mei 2022)

Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan oleh narasumber 5 selaku peserta didik SMP Negeri 1 Mojolaban, menyatakan: Hambatannya adalah kami sebagai peserta didik yang acuh tak acuh atau tidak serius dalam menerima dan mencari tahu materi pendidikan antikorupsi ini sehingga menyebabkan peserta didik sedikit terkendala dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi itu sendiri. (hasil wawancara 19 Mei 2022)

Selanjutnya narasumber 10 selaku peserta didik SMP Negeri 1 Mojolaban menyatakan:

Ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikannya, yaitu dari pihak keluarga, ruang lingkup pendidikan karakter pertama kali tentu harus di tanam melalui sebuah keluarga. Kemudian lingkungan, jaman sekarang telah diketahui bahwa lingkungan berperan besar dalam pembentukan karakter seorang anak. (hasil wawancara 19 Mei 2022)

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh narasumber 12 selaku peserta didik SMP N 1 Mojolaban :

Kendala atau hambatannya yaitu kurangnya kesadaran kita dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi tersebut. (hasil wawancara 21 Mei 2022).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang dihadapi peserta didik dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran khususnya pada mata pelajaran PPKn adalah peserta didik yang acuh tak acuh dalam menerima dan mencari tahu materi pendidikan antikorupsi sehingga menyebabkan peserta didik sedikit terkendala dalam mengimplementasikan. Peserta didik

juga berpendapat bahwa materi nya sulit untuk dipahami, kemudian kurangnya pemahaman guru serta peserta didik mengenai teori maupun pengimplementasiannya dan minat peserta didik yang rendah.

Berdasarkan pada hasil wawancara pada 8 responden peserta didik yang diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik pernah melakukan perilaku berbohong, seperti mencontek, tetapi untuk membolos peserta didik tidak pernah melainkan apabila tidak dapat hadir selalu menggunakan surat izin. Tetapi peserta didik setelah melakukan hal tidak baik tersebut timbul rasa penyesalan dalam diri. Kemudian menurut peserta didik lebih memilih jujur dengan nilai pas-pasan daripada berbohong dengan nilai yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran. Karena dengan melakukan kejujuran dapat melatih kemampuan diri. Peserta didik juga pernah melihat sikap tidak jujur di sekolah. Tetapi tidak semua peserta didik melakukan hal tersebut. Bagi peserta didik sikap jujur itu sangat penting karena dengan jujur dapat menjadikan peserta didik menjadi generasi yang lebih baik untuk bangsa dan negaranya dan menghindari perilaku yang menyimpang akibat korupsi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada sub pembahasan sebelumnya mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran pada peserta didik, maka dapat ditarik kesimpulan pendidikan anti korupsi sudah ada dalam kurikulum dan sudah di implementasikan dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan namun masih ada beberapa guru yang belum mengintegrasikan pemahaman anti korupsi dengan materi

pembelajaran yang disajikan sehingga pembelajaran pendidikan anti korupsi ini tidak semua peserta didik mengetahuinya atau mempelajarinya.

Kejujuran dapat dibentuk melalui pendidikan dan pengajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai melalui sikap dan perilaku dalam usaha mengembangkan potensi kejujuran dalam diri peserta didik, untuk mencapai tingkat kejujuran itu, sekolah yang merupakan salah satu lingkungan pendidikan memiliki peran penting setelah keluarga, hal ini dapat diwujudkan dengan teknik pembelajaran berbagai pembiasaan kejujuran dan pemberian penguatan terhadap perilaku jujur.

Bentuk implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka penguatan nilai karakter kejujuran yaitu pelaksanaan kegiatan pagi sholat dhuha dan siang sholat dzuhur bersama, dengan adanya koperasi dan kantin kejujuran, pendekatan yang bersifat humanis, mengintegrasikan materi dengan tema jujur, pihak yang berwenang harus diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendidikan antikorupsi.

Terwujudnya pendidikan karakter jujur peserta didik tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang turut mempengaruhinya. Faktor pendukung antara lain komitmen guru, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan orang tua, lingkungan yang kondusif, adanya kerjasama semua komponen, guru saling bekerja sama dan peran guru BK dalam menangani peserta didik yang tidak sesuai.

Kemudian faktor penghambatnya antara lain Wabah Covid-19, kurangnya motivasi dari sebagian peserta didik, perbedaan pendapat pihak sekolah dan orang tua, guru merasa kewalahan dengan banyaknya materi muatan yang ada, kemampuan guru memilih mata pelajaran, pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dan tidak

semua mata pelajaran mengimplementasikannya, masih ada beberapa guru yang belum mengintegrasikan pemahaman antikorupsi dan rendahnya minat peserta didik untuk mempelajari tentang korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Buchory MS & Tulus Budi s, 2014. Implementasi Program Pendidikan Karakter di SMP *Jurnal UNY : Pendidikan Karakter*.
- Chabullah, wibisono. 2011. *Memberantas Korupsi dari dalam diri*. Jakarta: Al- Wasat.
- Damon, William. 2002. *Bringing In New Era In Character Education* (Stanford University : Hoover Institution.
- Daryanto & Darmiatun, Suryatri. 2013. *Implementasi Karakter di Sekolah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Desmita. 2011. *Psikologi Perkembangan*. (Bandung:Rosda)
- Eka Prihatin, 2011. *Manajemen Peserta didik*, (Bandung: Alfabeta,)
- Hamid, Hamdani & Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hariyanto, Samani, Muchlas. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karkater*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kadir, Abdul. 2014. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Kompri. 2015. *Manajemen Pendidikan : Komponen-komponen elementer kemajuan sekolah*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Lickona, Thomas. 2013. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan J.A.Wamauongo. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Indira dan Satrio. "Internalisasi Nilai-nilai Pada Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah" *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol, 1. No, 4. (Februari 2019).
- Mustoip, Sofyan, dkk. 2018. *Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya: CV

- Jakad Publishing.
- Nurdin, Muhammad. 2014. *Pendidikan antikorupsi*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media
- Rukiyati & L. Andriani Purwastuti. 2016. Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Dasar Bantul Yogyakarta. *Jurnal UNY: Pendidikan Karakter*.
- Salahudin, Anas, 2018. *Pendidikan antikorupsi*, (Bandung: Pustaka Setia,)
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Sidik Nuryanto, "Dongeng Sebagai Pendidikan antikorupsi Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Pendidikan PraSekolah dan Sekolah Awal*, Vol 1. No. 1. 2016, 62.
- Subur. 2015. *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,)
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Supeni, Siti dkk. 2021: *analisis kebijakan model pengembangan sekolah ramah anak (SRA) pada sekolah dasar (SD) dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya daerah untuk mendukung kota layak anak*. Surakarta : Unisri Press
- _____. *Pengembangan Internalisasi Pendidikan Karakter Pancasila Pada Guru Pendidikan Anak Usia Dini*. *Cakrawala Pendidikan*. No 1 (Februari 2015)
- _____. *Teaching Culture-based Character Education on Elementary School: Internalizing Local Culture during Covid-19 Crisis*. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 48 No. 12 (December 2021). (<http://jonuns.com/index.php/journal/issue/view/81>) Diakses pada 7 Maret 2022 Pukul 11:33
- Sutoyo, dkk. 2020. *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Surakarta: Unisri Press
- Syarbini, Amirullah. 2016. *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasin, A. Fatah. 2016. *Dimensi- Dimensi Pendidikan Karakter Kejujuran*.
- Zainal Arifin, 2011. *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,)
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zubaedi. 2015. *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Sumber Undang-undang :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)